

**PEMETAAN PERAN STAKEHOLDER UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI  
KAWASAN AGROPOLITAN SOBURBANG KABUPATEN BANGKALAN**

**Novi DB Tamami**

Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura  
nopy.agb@gmail.com

**Abstrak**

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketahanan pangan paling rendah di pulau Madura. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memacu kondisi ketahanan pangan masyarakat Bangkalan. Salah satu kebijakan pemerintah daerah Bangkalan untuk memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat tersebut adalah penetapan kawasan agropolitan SOBURBANG. Tujuan dari penelitian ini: (1) mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam rangka percepatan pembangunan kawasan agropolitan Soburbang di Kabupaten Bangkalan, (2) mengetahui peran semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan kawasan Agropolitan Soburbang di Kabupaten Bangkalan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan didukung oleh data-data kuantitatif yang diperoleh dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan kawasan agropolitan Soburbang terhambat disebabkan antara lain karena Sumber daya manusia masih terbatas, sumber dana terbatas, adanya permasalahan lahan dengan masyarakat, peraturan daerah belum tegas. Adapun stakeholder yang terlibat dalam pembangunan kawasan agropolitan Soburbang di Kabupaten Bangkalan antara lain adalah Dinas Pertanian Propinsi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pembangunan Umum Kabupaten, LSM, universitas, masyarakat, Bappeda, Kelompok tani dan dunia usaha yang akan mendukung pembangunan kawasan agropolitan Soburbang dalam aspek ekonomi.

**Kata Kunci:** stakeholder, ketahanan pangan, peran, agropolitan.

**Abstract**

*Bangkalan is one of the regions with the lowest level of food security in Madura. Various attempts were made by local governments to boost food security conditions. One of local government policies to spur economic growth in the community is the establishment of agropolitan SOBURBANG. The purpose of this study: (1) study the problems faced to accelerate the development of agropolitan Soburbang, (2) determine the role of all stakeholders involved in development Agropolitan Soburbang. Data were analyzed descriptively qualitative backed by quantitative data obtained from secondary data. The results showed that the implementation of agropolitan Soburbang hampered development caused partly because of limited human resources, limited funding sources, the land issues with the public, local regulations have not been unequivocal. The stakeholders involved in the development of agropolitan Soburbang include the Department of Provincial Agriculture, Department of Agricultural and Veterinary Office, Department of Industry and Trade, Department of Cooperatives, Department of General Development District, NGOs, universities, communities, Bappeda, farmer groups and the world businesses that will support the development of agropolitan Soburbang in aspects of the problem and the economic.*

**Keywords :** stakeholder, food security, roles, agopolitan.

## PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian nasional saat ini semakin tak menentu. Harga kebutuhan pokok semakin meningkat, sedangkan lapangan pekerjaan semakin sulit. Hal ini semakin memicu isu kerawanan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai terobosan dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan di Indonesia, salah satunya mengembalikan visi dan misi pembangunan pertanian ke depan, melalui “Revitalisasi Pertanian”. Pembangunan Pertanian tentunya akan selalu identik dengan Perdesaan. Perdesaan menjadi semakin penting bagi pembangunan nasional, ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, ekonomi pedesaan membuktikan mampu bertahan dalam kemelut krisis tersebut. Dengan demikian sektor ekonomi di pedesaan dianggap memiliki kekuatan yang dapat menjadi daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi arus globalisasi (Argo, 2005).

Upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan terobosan program yang melibatkan berbagai pihak secara terarah dan terkoordinasi, salah satu program terpadu tersebut adalah pembangunan kawasan agropolitan. Pengembangan agropolitan berarti membangun titik-titik tumbuh ekonomi daerah berbasis pertanian, dengan harapan satu titik tumbuh akan dapat mendinamisasi dan menstimulasi tumbuh dan berkembangnya titik-titik tumbuh perekonomian yang lain. Bila keadaan ini berjalan lancar, dengan sendirinya percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan dapat dengan mudah diwujudkan (Tan, 2007).

Departemen Pertanian RI menetapkan 61 kawasan pengembangan kawasan agropolitan di beberapa Propinsi di Indonesia. Salah satu Kabupaten yang termasuk dalam pencaanangan kawasan tersebut adalah Kabupaten Bangkalan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan ditetapkan sebuah kawasan ekonomi khusus, yang menekankan pada pengembangan kawasan Agropolitan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.520/2403/021.2/2005. Kawasan tersebut meliputi wilayah Kecamatan Socah, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Kota Bangkalan, sehingga ketiga kawasan itu dikenal dengan sebutan kawasan Agropolitan SOBURBANG.

Sebagai bagian dari kawasan perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah penunjang Kota Surabaya dalam mendukung sektor industri, khususnya agroindustri. Untuk itu, Kabupaten Bangkalan harus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayahnya melalui pengembangan kawasan agropolitan di tiga kecamatan yang ditunjuk sebagai kawasan ekonomi khusus. Jenis-jenis kegiatan yang harus disediakan di kawasan tersebut meliputi perdagangan, perniagaan, serta perumahan dengan fasilitas umum dan sosial. Disamping itu, Kabupaten Bangkalan akan difungsikan sebagai daerah penyangga dengan kegiatan industri pengolahan, pertanian, industri pertanian, serta perumahan (Bappeda, 2012).

Pertanian dan industri berbasis hasil pertanian akan dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Bangkalan. Luas lahan sawah di Kabupaten Bangkalan sampai dengan 20 tahun ke depan akan ditingkatkan dari 8.000 Ha menjadi 30.000 Ha. Fokus kebijakan pengembangan lahan sawah akan dilakukan dengan mengubah sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi. Kabupaten Bangkalan juga berencana memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu lahan kering seluas 97.000 Ha yang belum tergarap (Departemen Penataan Ruang, 2009). Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan lahan pertanian kering untuk jagung dan mente. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pembangunan yang terintegrasi antar perkebunan dengan peternakan. Kabupaten Bangkalan merencanakan dapat mengedepankan peternakan sapi sebagai sektor unggulan, karena Sapi Madura dikenal cukup baik kualitasnya.

Kawasan Agropolitan soburbang dirancang sebagai penghasil produk pertanian unggulan. Di kawasan tersebut rencananya akan dibangun pabrik untuk mengolah produk pertanian unggulan di Bangkalan, selain itu akan terdapat Sub Terminal Agribis (STA) yang dalam masterplan akan berada di Pasar Kencur, Kecamatan Socah. Dari segi kualitas Bangkalan memiliki sejumlah produk unggulan seperti varietas Salak Kramat Bangkalan dan Melati Rato Ebu yang sudah diakui secara nasional sebagai produk unggulan kabupaten Bangkalan. Disamping itu, salah satu aspek yang menjadi target adalah terkait dengan penataan ruang kawasan kaki Jembatan Suramadu yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Kawasan tersebut merupakan sentra yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Bangkalan (BAPPEDA, 2012).

Namun dalam pelaksanaannya, program agropolitan di Kabupaten Bangkalan belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Sejak ditetapkan tahun 2005 silam, Implementasi agropolitan sebagai program yang bersifat *top down* masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Lemahnya sosialisasi program sehingga banyak masyarakat di kawasan agropolitan yang kurang dan tidak mengetahui sama sekali tentang agropolitan. Kurangnya koordinasi antara dinas/instansi terkait dan terkesan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan berjalan sendiri-sendiri. lemahnya akses petani terhadap sumber pemodal, belum lengkapnya sarana prasarana pendukung, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pertanian yang ramah lingkungan, kurangnya kesadaran petani untuk bergabung dalam kelompok dan tidak stabilnya harga jual komoditi di kawasan agropolitan menambah panjang catatan permasalahan di tengah pengembangan agropolitan.

Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah bersama masyarakat untuk membenahi kembali kelemahan-kelemahan yang dirasakan sebagai faktor yang menjadi penyebab belum berjalannya agropolitan tersebut. Menurut Agusta (2007), kelembagaan menempati posisi paling mendasar untuk mengembangkan potensi individu maupun kelompok pemanfaat serta solidaritas antar pihak. Munculnya kelemahan kelembagaan dalam program agropolitan berakar pada pembelokan kebijakan pada paradigma modernism, padahal teori dasar dari program agropolitan adalah paradigma pembangunan dan pemberdayaan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Sutarto, dkk (2010) mengungkapkan hal senada, bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan kedepan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan yang bermuara pada pengembangan ekonomi local. Terkait tujuan tersebut, membangun kelembagaan di bidang agribisnis sangat urgen untuk dilakukan, mengingat semakin lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) petani dalam agribisnis. Penguatan kelembagaan agribisnis tidak hanya menyangkut *on farm bussiness* saja tetapi juga *off farm agribussiness*-nya. Kelembagaan agribisnis selama ini masih banyak bersifat *patronase*, sehingga masih dijumpai eksploitasi antar pelaku agribisnis dalam satu jaringan agribisnis baik secara terselubung, legal maupun terbuka.

Terkait dengan hal tersebut, budaya Madura tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan beberapa lembaga lokal yang sangat kuat pengaruhnya disetiap aspek kehidupan, terutama dalam aspek pertumbuhan ekonomi lokal. Kosim (2007), mengungkapkan bahwa eksistensi *Blater* dalam kegiatan bisnis di kawasan Madura sangatlah sentral, dalam hal ini *blater* berperan sebagai penjaga keamanan tempat usaha. Para pengusaha tidak hanya mempercayakan keselamatan tempat usahanya pada satpam dan aparat kepolisian saja, akan tetapi para pengusaha juga memanfaatkan jasa para *Blater* dalam menjaga keamanan tempat usahanya. *Blater* atau kelompok masyarakat abangan tumbuh berdampingan dengan lembaga lokal lain seperti lembaga agama, lembaga pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam rangka mensinergikan hubungan timbal balik antar kelembagaan yang berpengaruh dalam perekonomian local di Bangkalan, dirasa perlu melakukan penelitian dengan judul Pemetaan Peran Stakeholder untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kawasan Agropolitan Soburbang Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam rangka percepatan pembangunan kawasan agropolitan Soburbang di Kabupaten Bangkalan, (2) mengetahui peran semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan kawasan Agropolitan Soburbang di Kabupaten Bangkalan.

## **METODE PENELITIAN**

Penentuan lokasi penelitian ini dilaksanakan secara purposive, di tiga Kecamatan yang terpilih sebagai kawasan ekonomi khusus dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bangkalan. Tiga Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Sochah, Burneh dan Kecamatan Kota Bangkalan. Tiga daerah ini merupakan sentra dari produk-produk unggulan daerah Bangkalan seperti Salak Kramat, Melati Ratoh Ebu, Jagung, Menteng serta Sapi Madura.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) dan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Pada penelitian ini, peneliti memakai informan yang terdiri dari semua tokoh pada kelompok lembaga sosial yang ada pada masyarakat di kawasan pengembangan agropolitan seperti lembaga kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, pemerintahan terkait dan lembaga lain yang mungkin diperoleh saat penelitian. Wawancara dilakukan melalui kunjungan dari rumah ke rumah, tempat kerja dan tempat-tempat lain yang memungkinkan. Untuk menjamin tercapainya tujuan wawancara diperlukan pemilihan waktu dan tempat wawancara yang tepat sehingga informan kunci dapat dengan leluasa menyampaikan semua informasi yang dimilikinya.

Untuk memperdalam hasil penelitian, peneliti juga melakukan pengamatan (*Observasi*) yang bertujuan untuk mendapatkan data fenomena sosial yang bersifat kejadian atau kegiatan yang dilakukan di titik-titik pusat kegiatan yang menjadi focus pengembangan agropolitan, seperti di Pasar Kencur Burneh, kawasan

kaki Jembatan Suramadu, pusat Agroindustri Salak Kramat di Bangkalan, Pasar Melati Ratoh Ebu di Tunjung dan tempat lainnya. Selain itu pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan atas hasil wawancara. Pengamatan berpartisipasi merupakan salah satu strategi untuk mencegah rasa curiga pada objek amatan. Untuk itu pada penelitian ini, pengamatan berpartisipasi menjadi salah satu metode pengumpulan data.

Hasil yang diharapkan adalah lahirnya pemetaan peran semua stakeholder atau pemangku kepentingan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal dimana dari masing-masing pranata sosial tersebut memiliki peranan yang setara dalam memajukan perekonomian masyarakat lokal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *stakeholder*. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk mengidentifikasi kepentingan dan peran berbagai *stakeholder* dengan tujuan akhir dapat memberikan rekomendasi strategis untuk melanggengkan partisipasi para pemangku kepentingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Umum Kawasan Agropolitan Soburbang

Kawasan Agropolitan Soburbang, dicanangkan dengan menetapkan tiga buah kecamatan penyangga yaitu Kecamatan Socah, Kecamatan Burneh dan Kecamatan kota Bangkalan yang kemudian disingkat dengan istilah Soburbang. Secara rinci berikut akan dijelaskan profil ketiga kecamatan tersebut:

#### Kecamatan Socah

Secara administratif wilayah kecamatan Socah terbagi menjadi 11 desa dengan luas 52,82 Km<sup>2</sup> atau 5.359,05 Ha dan berada ditinggikan 15 m dari permukaan laut. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangkalan. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tragah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kamal. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selat Madura.

Jumlah penduduk Kecamatan Socah tahun 2012 sebanyak 20.223 jiwa terdiri dari laki-laki 39.424 jiwa dan perempuan 50.799 jiwa. Sex Ratio sebesar 77,61 persen yang berarti penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk tertinggi atau terdapat berada di Desa Junganyar rata-rata 6.508,24 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan terendah di Desa Bilaporah rata-rata 667,90 jiwa/km<sup>2</sup>.

Masyarakat Kecamatan Socah umumnya membudidayakan tanaman pangan sambil beternak hewan peliharaan. Total produksi padi di Kecamatan Socah tahun 2012 mencapai 12.929,86 ton terdiri dari 5.703,78 ton padi sawah dan 1.616,81 padi ladang. Sedangkan, produksi jagung mencapai 3.448,39 ton, kacang tanah mencapai 5.525,10 ton, dan produksi ketela pohon mencapai 2.635,78 ton. Secara keseluruhan jumlah ternak tahun 2012 mencapai 12.079 ekor terdiri dari 7.327 ekor sapi, 345 ekor kerbau, 4.170 kambing dan 237 ekor kuda. Pada populasi unggas di Kecamatan Socah sebanyak 6.865 ekor terdiri dari 3.387 ekor ayam kampung, 900 ayam potong, dan 2.578 ekor itik. Sebaran daerah pertanian di Kecamatan Socah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Luas Produksi dan sebaran produk unggulan Kecamatan Socah

No.	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	% Thd. Luas Kecamatan	Produk Unggulan
1	Socah	1.15	2.14	Padi
2	Jaddih	8.25	15.33	Salak
3	Keleyan	6.35	11.80	Rambutan
4	Buluh	5.47	10.17	Padi, jagung
5	Bilaporah	10.50	19.51	Salak
<b>JUMLAH</b>		<b>31.72</b>	<b>58.95</b>	

Sumber: Profil Kecamatan, 2013

#### Kecamatan Burneh

Secara administratif wilayah Kecamatan Burneh terbagi menjadi 12 Desa/Kelurahan dengan luas 66,10 Km<sup>2</sup> atau 6.610 Ha dan berada ditinggikan 10 m dari permukaan laut. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arosbaya. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Merah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tragah. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkalan.

Jumlah penduduk Kecamatan Burneh tahun 2012 sebanyak 62.675 jiwa terdiri dari laki-laki 41.148 jiwa dan perempuan 40.717 jiwa. Sex Ratio sebesar 101.06 persen yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk tertinggi atau terdapat berada di Desa Pangolongan rata-rata 6.500 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan terendah di Desa Perreng rata-rata 465.19 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kondisi pertanian masyarakat di Kecamatan Burneh hampir sama dengan Kecamatan Socah. Komoditas unggulan juga tetap berfokus pada tanaman pangan. Total produksi di Kecamatan Burneh tahun 2012 mencapai 33.538 ton padi sawah. Pada periode yang sama produksi jagung mencapai 4.982 ton dan kacang tanah mencapai 1.741 ton. Disamping itu, peternakan juga dijumpai di Kecamatan Burneh. Secara keseluruhan jumlah ternak tahun 2012 mencapai 5.935 ekor terdiri dari 3.395 ekor sapi, 5 ekor domba, 1.338 ekor kambing, 91 ekor kuda dan 1.096 ekor kerbau. Populasi unggas di Kecamatan Burneh sebanyak 46.251 ekor terdiri dari 39.182 ekor ayam kampung dan 7.069 itik. Luas wilayah dan sebaran produk unggulan di Kecamatan Burneh Nampak pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Luas Wilayah dan Sebaran Produk Unggulan Kecamatan Burneh

No.	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	% Thd. Luas Kecamatan	Produk Unggulan Tahun 2003
1	Burneh	7.56	11.44	--
2	Langkap	6.26	9.47	Emping Melinjo
3	Tonjung	5.21	7.88	Melati dan Telur asin
<b>JUMLAH</b>		<b>19.03</b>	<b>28.79</b>	

Sumber: *Profil Kecamatan, 2013*

### **Kecamatan Bangkalan**

Secara administratif wilayah kecamatan Bangkalan terbagi menjadi 13 Desa/kelurahan, dengan luas 3501,78 km<sup>2</sup> atau 35,02 Ha, pada ketinggian 5 m dari permukaan laut, adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arosbaya; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Burneh; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Socah; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Madura.

Jumlah penduduk Kecamatan Bangkalan tahun 2012 sebanyak 94.729 jiwa terdiri dari laki-laki 47.543 jiwa dan perempuan 47.186 jiwa. Sex Ratio sebesar 100,76 persen, yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk tertinggi atau terpadat berada di Desa Demangan rata-rata 16.520 jiwa/ km<sup>2</sup>, sedangkan terendah di Desa Ujung Piring rata-rata 622,78 jiwa/ km<sup>2</sup>.

Produksi pertanian di daerah ini, juga focus pada tanaman pangan. Total produksi padi sawah di Kecamatan Bangkalan tahun 2012 mencapai 11.481 ton padi. Pada periode yang sama produksi jagung mencapai 1.748,78 ton dan kacang tanah mencapai 677,88 ton. Apabila diikuti perkembangannya populasi ternak di Kawasan Bangkalan tidak mengalami perubahan. secara keseluruhan jumlah ternak tahun 2012 mencapai 5.429 ekor terdiri dari 2.336 ekor sapi, 2.787 ekor kambing 306 ekor kerbau. Pada populasi Unggas di Kecamatan Bangkalan sebanyak 114.246 ekor. Luas wilayah dan sebaran produk unggulan di Kecamatan Bangkalan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.** Luas Wilayah dan Sebaran Produk Unggulan di Kecamatan Bangkalan

No.	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	%Thd.luas Kecamatan	Produk Unggulan
1.	Kemayoran	1.62	4.62	Salak
2.	Mlajah	6.00	17.13	Salak
3.	Mertajasah	0.89	2.54	--
4.	Kramat	4.85	13.85	Salak & sawo kecil
<b>JUMLAH</b>		<b>13.36</b>	<b>38.14</b>	

Sumber: *Profil Kecamatan, 2013*

### **Gambaran umum Produksi Tanaman Pangan di Kawasan Agropolitan Soburbang**

Ketiga kecamatan yang disiapkan dalam konsep kawasan agropolitan Soburbang memiliki kesamaan dalam beberapa produk pangan unggulan. Sehingga jika dioptimalkan, ketiga kecamatan ini akan mampu menjadi daerah sentra yang akan menyangga kebutuhan masyarakat akan pangan di Kabupaten Bangkalan.

**Tabel 4.** Produktivitas Padi Sawah di Kawasan Agropolitan

No.	Desa	Hasil Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas(Ton/Ha)
<b>Kec. Socah</b>				
1	Socah	4,10	1,00	4,10
2	Jaddih	157,50	35,50	4,50
3	Keleyan	283,50	63,00	4,50
4	Buluh	1.486,00	310,00	4,79
5	Bilaporah	689,00	1.350,00	0,51
<b>Kec. Burneh</b>				
1	Burneh	3.424,50	761	4,50
2	Langkap	3.091,70	719	4,30
3	Tonjung	3.364,20	756	4,45
<b>Kec. Bangkalan</b>				
1	Kemayoran	-	-	-
2	Mlajah	1.421,75	235,00	6,05
3	Mertajasah	82,40	16	5,15
4	Kramat	1.927,60	316,00	6,10
<b>JUMLAH</b>		<b>15.932,25</b>	<b>4.562</b>	<b>48.95</b>

Sumber: Profil Kecamatan, 2013

Dari tabel tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa Desa Burneh merupakan penghasil padi terbesar yaitu 3.424,50 Ton, sedangkan yang terendah terdapat di Desa Socah yaitu 4,10 Ton.

**Tabel 5.** Produktivitas Jagung di Kawasan Agropolitan

No.	Desa	Hasil Prosuksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton / Ha)
<b>Kec. Socah</b>				
1	Socah	32.55	30.00	1.09
2	Jaddih	179.00	450.00	0.40
3	Keleyan	795.00	270.00	2.94
4	Buluh	230.85	228.00	0.40
5	Bilaporah	727.50	250.00	2.91
<b>Kec. Burneh</b>				
1	Burneh	--	--	--
2	Langkap	--	--	--
3	Tonjung	--	--	--
<b>Kec. Bangkalan</b>				
1	Kemayoran	--	--	--
2	Mlajah	108.36	42.00	2.58
3	Mertajasah	6.30	6.30	2.10
4	Kramat	552.05	181.00	3.05
<b>JUMLAH</b>		<b>2.631.61</b>	<b>1.454.00</b>	<b>15.47</b>

Sumber: Profil Kecamatan, 2013

Desa yang menghasilkan tanaman jagung terbesar yaitu Desa Keleyan dimana desa tersebut menghasilkan 795.00 ton. Kecamatan Burnah dan Desa Kemayoran Kecamatan Bangkalan tidak dapat menghasilkan tanaman jagung.

**Tabel 6.** Produktivitas Kacang Tanah di Kawasan Agropolitan

No.	Desa	Hasil Prosuksi (Ton)	Luas Panen(Ha)	Produktivitas (Ton / Ha)
<b>Kec. Socah</b>				
1	Socah	133.50	44.50	3.00
2	Jaddih	1.720.00	550.00	3.13
3	Keleyan	.1.100.00	340.00	3.24
4	Buluh	623.70	198.00	3.15
5	Bilaporah	528.00	165.00	3.20
<b>Kec. Burneh</b>				
1	Burneh	124.24	69	1.80
2	Langkap	129.56	79	1.64
3	Tonjung	247.22	94	2.63

No.	Desa	Hasil Produksi (Ton)	Luas Panen(Ha)	Produktivitas (Ton / Ha)
<b>Kec. Bangkalan</b>				
1	Kemayoran	--	--	--
2	Mlajah	27.00	12.00	2.25
3	Mertajasah	--	--	--
4	Kramat	205.74	81.00	2.54
<b>JUMLAH</b>		<b>2,018.96</b>	<b>1,632.50</b>	<b>26.58</b>

Sumber: Profil Kecamatan, 2013

Produksi tanaman kacang tanah dihasilkan di beberapa desa yaitu Desa Socah, Jaddih, Keleyan, Buluh, Bilaporah, Burneh dan Langkap. Hasil produksi tertinggi terdapat di Desa Jaddih yaitu sebesar 1.705.00 ton/ha sedangkan produksi terendah terdapat di Desa Mlajah sebesar 27.00 ton.

**Tabel 7.** Produktivitas Ketela pohon di Kawasan Agropolitan

No.	Desa	Hasil Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
<b>Kec. Socah</b>				
1	Socah	3.10	1.00	3.10
2	Jaddih	77.50	25.00	3.10
3	Keleyan	341.00	520.00	0.66
4	Buluh	586.00	110.00	5.33
5	Bilaporah	341.00	520.00	0.66
<b>Kec. Burneh</b>				
1	Burneh	--	--	--
2	Langkap	--	--	--
3	Tonjung	--	--	--
<b>Kec. Bangkalan</b>				
1	Kemayoran	--	--	--
2	Mlajah	--	--	--
3	Mertajasah	--	--	--
4	Kramat	--	--	--
<b>JUMLAH</b>		<b>1,348.60</b>	<b>1,176.00</b>	<b>12.85</b>

Sumber : Dispertanak, 2013

Produksi Ketela Pohon dihasilkan di beberapa desa yaitu Desa Jaddih, Keleyan, Buluh, Bilaporah, Burneh, Langkap, dan Tonjung. Hasil produksi tertinggi di Desa Jaddih yaitu sebesar 586.00 ton/ha, sedangkan produksi terendah terdapat di Desa Socah sebesar 3.10 ton.

**Tabel 8.** Produktivitas Salak di Kawasan Agropolitan

No.	Kecamatan	Jumlah Tan(Ph)		Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Kw)
		(Ph)	(Ha)		
1.	Kec. Socah	79.524	53	0,10	13.927
2.	Kec. Burneh	335	0,2	0,10	33
3.	Kec. Bangkalan	54.219	36	0,10	5.851

Sumber: Dipertanak, 2013

Untuk komoditi salak terbesar terdapat di Kecamatan Socah dengan jumlah tanaman sebesar 79.524 pohon sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Burneh sebesar 335 pohon.

**Tabel 9 .** Produktivitas Rambutan di Kawasan Agropolitan

No.	Kecamatan	Jumlah Tan(Ph)		Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Kw)
		(Ph)	(Ha)		
1.	Kec. Socah	68.005	453	0.71	88.150
2.	Kec. Burneh	15.560	104	0.32	3.087
3.	Kec. Bangkalan	2.099	14	0.25	151

Sumber: Dipertanak 2013

Kawasan Agropolitan Soburbang menghasilkan rambutan sebesar 85.781 pohon atau dengan hasil produksi 331,190 Kwintal. Penghasil rambutan tertinggi adalah Kecamatan Socah dengan hasil produksi sebesar 5.602 Kwintal.

**Tabel 10.** Produktivitas Mangga di Kawasan Agropolitan

No.	Kecamatan	Jumlah Tan (Ph)		Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Kw)
		(Ph)	(Ha)		
1.	Kec. Socah	34.437	344	0.32	2.505
2.	Kec. Burneh	27.102	27	0.20	3.280
3.	Kec. Bangkalan	32.768	328	0.20	5.956

Sumber: *Data Dipertanak 2013*

Untuk komoditi mangga terbesar terdapat di Kecamatan Socah dengan jumlah tanaman sebesar 34.437 pohon sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Burneh sebesar 27.102 pohon.

**Tabel 11.** Produktivitas Pisang di Kawasan Agropolitan

No.	Kecamatan	Jumlah Tan(Ph)		Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Kw)
		(Ph)	(Ha)		
1.	Kec. Socah	28.670	26	0.28	14.045
2.	Kec. Burneh	65.000	59	0.08	1.836
3.	Kec. Bangkalan	24.904	23	0.09	936

Sumber: *Dipertanak, 2013*

Untuk komoditi pisang terbesar terdapat di Kecamatan Burneh dengan jumlah tanaman sebesar 65.000 pohon sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Bangkalan sebesar 24.904 pohon.

**Tabel 12.** Produktivitas Melati di Kawasan Agropolitan

No.	Kecamatan	Jumlah Tan(Ph)		Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Kw)
		(Ph)	(Ha)		
1.	Kec. Socah	--	--	--	--
2.	Kec. Burneh	183.280	18.33	0.37	260.000
3.	Kec. Bangkalan	531	0.05	--	--

Sumber: *Dipertanak, 2013*

Untuk komoditi melati hanya terdapat di Kecamatan Burneh dengan jumlah tanaman sebesar 183.280 pohon sedangkan di Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis komoditi ini.

**Tabel 13.** Produktivitas Nangka di Kawasan Agropolitan

No.	Kecamatan	Jumlah Tan (Ph)		Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Kw)
		(Ph)	(Ha)		
1.	Kec. Socah	21.941	219	0.73	16.885
2.	Kec. Burneh	8.035	80	0.73	5.866
3.	Kec. Bangkalan	1.719	17	0.80	706

Sumber: *Dipertanak, 2012*

Untuk komoditi nangka terbesar terdapat di Kecamatan Socah dengan jumlah tanaman sebanyak 21.941 pohon sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Bangkalan sebanyak 1.719 pohon.



## **KENDALA-KENDALA STAKEHOLDER UNTUK PENGEMBANGAN AGROPOLITAN**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan pada berbagai level pemangku kepentingan, yaitu:

### **Permasalahan pada Tingkat PEMDA**

#### 1. BAPPEDA

Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Bangkalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Bangkalan menjadi terhambat dikarenakan BAPPEDA hanya menganggap sebagai sekretariat sehingga menyebabkan saling lempar tanggung jawab dengan SKPD lain yang terkait dan program pengembangan kawasan agropolitan menjadi terhambat.

#### 2. BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian)

BKP3 sebagai anggota POKJA yang mengatasi masalah peningkatan kualitas SDM dan penyuluhan, memiliki kendala seperti kendala musim yang tidak menentu. Sehingga penanaman komoditas yang dikembangkan menjadi tertunda. Kemudian masalah penyerapan anggaran untuk agropolitan. Sistem penganggaran yang idealnya digunakan adalah sistem penganggaran triwulan. Apabila belum memasuki musim tanam maka dana tersebut tidak dapat dicairkan. Kendala lain yang dihadapi yaitu lahan yang lebih diutamakan adalah lahan tadah hujan. Terkait dengan penyuluhan, masalah yang dihadapi adalah kurangnya tenaga penyuluh. Seharusnya dalam 1 desa terdapat 1 orang penyuluh, namun kenyataannya yang terjadi di lapang hanya ada 2 sampai 3 penyuluh di setiap Kecamatan. Hal ini disebabkan kurangnya minat dan keahlian dari masyarakat untuk menjadi tenaga penyuluh. Selain itu banyak tenaga penyuluh yang beralih jabatan menjadi pegawai struktural.

#### 3. Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Menurut Kepala Bidang UKM, dalam pelaksanaan pengembangan agropolitan di Kecamatan Bangkalan terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Ketika mereka gagal menjalankan usaha yang dimilikinya, mereka lebih memilih untuk berhenti melanjutkan usaha tersebut dibandingkan harus memulai merintis usahanya kembali. Selain itu sistem pembinaan masih kurang bisa diterima dan sulit mengubah pola pemikiran pelaku usaha atau kelompok tani. Kendala lain yang dihadapi yaitu bantuan yang dianggarkan kurang tepat sasaran.

#### 4. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)

Kepala bidang usaha dan industri menyimpulkan kendala-kendala yang dialami oleh disperindag dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Bangkalan yaitu pengelolaan pasar kencur yang tidak dilakukan secara kontinyuitas dan tidak memiliki orientasi kedepannya sehingga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Dari sisi usaha dan industri kendala yang dihadapi yaitu pengusaha kurang memiliki jiwa pesaing yang tinggi sehingga mereka berfikir komoditas dan produk yang mereka hasilkan kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk lain yang kualitasnya lebih baik. Selain itu, masih banyak usaha-usaha kecil atau home industri yang belum berbadan hukum sehingga sulit untuk mereka mendapatkan bantuan modal.

### **Permasalahan pada Tingkat Kecamatan**

Pada level kecamatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program agropolitan adalah kurangnya tenaga dalam pengembangan program tersebut, artinya disini orang – orang yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan program agropolitan bukan orang yang memang difokuskan hanya pada terlaksananya program tersebut, melainkan mereka menanggung tugas ganda yang mana diawal itu sudah punya tugas pokok, sehingga mereka tidak benar – benar fokus pada kegiatan agropolitan. Selain itu juga pihak kecamatan masih kekurangan tenaga pendamping / penyuluh kecamatan, yang disebabkan oleh kurangnya minat dari yang mempunyai keahlian, dan mereka enggan untuk ditempatkan sebagai penyuluh, ditambah lagi permasalahan yang mana banyak tenaga penyuluh pindah jabatan ke struktural atau non teknis tanpa adanya pengganti di bagian yang di tinggalkan.

### **Permasalahan yang Ada di Lapang**

Permasalahan mendasar yang ada di lapang yaitu pada level petani khususnya di kecamatan Socah yaitu kurangnya pemahaman mengenai program agropolitan, sehingga masih ada sebagian dari para pelaku usahatani (petani) yang belum tahu mengenai program pemerintah tersebut. Beda halnya dengan itu, permasalahan yang dihadapi para pelaku usahatani (petani) sangat kompleks, diantaranya yaitu:

1. Permodalan  
Modal yang dimiliki oleh petani dikawasan agropolitan kecamatan Socah sangatlah minim dan untuk mengakses modalpun petani enggan yang dikarenakan proses yang dianggap sulit dan ribet, serta patani yang masih berpikir kurang beorientasi kedepan, sehingga dari itu usaha yang dijalankan oleh, para petani tersebut sulit untuk bisa dikembangkan.
2. Kualitas SDM  
Sumber daya manusia yang ada pada kalangan petani di kecamatan Socah belum cukup mampu untuk melakukan pengembangan usaha ke arah yang lebih moderen dan mempunyai *provit oriented*, petani masih sangat konvensional dalam menjalankan usahanya.
3. Komoditas Unggulan Tergolong Komoditas Musiman  
Komoditas yang dijadikan komoditas unggulan di kecamatan Socah masih tergolong komoditas musiman, dan belum adanya upaya untuk dilakukan mejadi komoditas yang bisa produksi sepanjang tahun seperti pada daerah – daerah yang sudah menerapkan. Maka dari itu masalah yang dihadapi para petani ketika komoditi tersebut belum waktunya berbuah petani jadi tidak ada pemasukan dan kegiatanpun jadi macet.
4. Petani Belum Bisa Efisien  
Kegiatan usahatani yang masih konvensional menjadikan para petani mengabaikan proses kalkulasi antara modal dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga petani tidak tahu apakah usahanya tersebut untung, impas, atau justru merugi.
5. Bertani Hanya Sebagai Pekerjaan Sampingan  
Kurang adanya keseriusan dari petani, karena merega berpikirnya bahwa kegiatan usahatani tidak adan bisa mendatangkan keuntungan yang besar, melainkan hanya memenuhi kebutuhan hidup saja.
6. Kurangnya Tenaga Penyuluh  
Tenaga penyuluh yang seharusnya pada setiap 1 desa itu 1 penyuluh itu belum terpenuhi untuk wilayah kecamatan Socah, yang ada adalah dalam 1 kecamatan Socah hanya ada 3 penyuluh, hal ini masih jauh dari kata cukup.

Peran dan Sinergi antara Pengelola kawasan agropolitan dengan Stakeholder lain

Analisis *Stakeholder (Interest VS Power)*

Analisis ini dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut *Interest* (minat) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *Power* (kekuasaan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut (Bryson, 2003). Keberhasilan suatu program yang melibatkan *stakeholder* lain tergantung kepada pemahaman yang jelas terhadap kepentingan dan wewenang. *Interest*/minat adalah: minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap keberhasilan pembangunan KPH. Sedangkan yang dimaksud dengan *Power* adalah: Kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan KPH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut:

HIGH		Interest (Kepedulian)	HIGH	
<b>Subject</b>	<b>Players</b>			
Masyarakat yang pro agropolitan Universitas Pemegang ijin usaha Poktan dan Gapoktan	BAPPEDA Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pembangunan Umum, Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Disperindag.			
<b>Crowd</b>	<b>Contest setter</b>			
Kelompok masyarakat yang anti agropolitan	Dinas kelautan Dinas Pendidikan			
LOW	Power (Kekuasaan)			HIGH

**Gambar 1.** Matriks pemetaan peran stakeholder pengembangan kawasan Agropolitan

Berdasarkan penempatan *stakeholder* pada gambar atau matriks di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Subject**

*Subject* adalah organisasi yang mempunyai minat besar namun memiliki kekuasaan yang rendah. *Subject* bisa diartikan sebagai organisasi yang peduli terhadap kegiatan pengembangan kawasan agropolitan yang mempunyai kesungguhan lebih baik walaupun tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau membuat peraturan-peraturan. Yang termasuk dalam *subject* adalah: pemegang ijin usaha, Universitas, masyarakat yang pro agropolitan, poktan dan gapoktan.

**2. Players**

*Players* adalah mereka yang mempunyai minat besar dan kekuasaan yang besar. *Players* bisa diartikan sebagai pemain utama dalam kegiatan pembangunan kawasan agropolitan. Instansi/lembaga ini mempunyai kekuasaan yang besar untuk melakukan sesuatu atau membuat aturan untuk pengelolaannya yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah : BAPPEDA merupakan pihak yang merencanakan program

agropolitan dan hanya sebagai sekretariat. Sedangkan pelaksana teknisnya adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pembangunan Umum, Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Disperindag.

### 3. Contest Setter

Kelompok ini mencakup instansi yang punya minat yang rendah, karena tidak secara langsung berkaitan dengan agropolitan, seperti dinas pendidikan, dinas kelautan dan dinas lainnya, akan tetapi pihak ini tidak menjadi pihak yang menentang adanya kawasan agropolitan.

### 4. Crowd

*Crowd* adalah mereka (Instansi/lembaga/masyarakat) yang mempunyai minat kecil dan kekuasaan yang kecil. Pada kotak ini dimasukkan masyarakat atau lembaga yang kurang peduli atau minatnya kecil terhadap kegiatan pembangunan kawasan agropolitan soburbang.

## PERAN STAKEHOLDER YANG TERKAIT DENGAN KAWASAN AGROPOLITAN

### 1. Balai Penyuluh Kecamatan

Balai Penyuluh Kecamatan merupakan badan yang mempunyai kegiatan dengan leading setor sebagai penyuluh yang mana balai ini berda dibawah naungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3).

Adapun peranannya yaitu, sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan terhadap para pelaku usahatani
- b. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM pada level petani, dan
- c. Sebagai serana konsultasi petani terkait permasalahan pada kegiatan usahatani mereka.

### 2. Mantri Tani

Mantri tani beda halnya dengan penyuluh pertanian, karena kalau mentri tani itu berada dibawah naungan Dinas Pertanian, yang fungsinya sebagai fasilitator para petani yang mengalami kesulitan dalam hal kegiatan usahatani.

### 3. Penyuluh atau Tenaga pendamping

Keberadaan penyuluh/ tenaga pendamping di wilayah Socah masih terbilang sangat kekurangan, dikarenakan dalam 1 kecamatan hanya terdapat 3 orang penyuluh.

### 4. Gapoktan

Gabungan kelompok tani mempunyai peran penting dalam kegiatan usaha tani di lini bawah, khususnya di kawasan agropolitan Kecamatan Socah. Karen aselain sebagai penggerak juga sebagai jembatan antara petani yang tergabung dalam poktan dengan pihak pemerintah, juga memperkuat keberadaan kelompok tani ketika ada yang harus di perjuangkan pada pemerintahan.

### 5. Poktan

Kelompok Tani sebagai asosiasi kecil pada lingkup pertanian di kecamatan Socah yang berjumlah 5 kelompok, seharusnya sangat membantu sebagai penggerak petani, sehingga petani menjadi semakin kuat dan terarah.

### 6. Koperasi Tingkat Kecamatan

Koperasi pada tingkat kecamatan pada kecamatan Socah sebagai penyedia modal dalam kegiatan usaha masyarakat khususnya kegiatan usahatani, seharusnya sangat membantu. Tetapi keberadaannya dilapan taidak demikian melainkan antara ada dan taida, yaitu tidak berjalan aktive yang di sebabkan oleh beberapa hal, mulai dari tidak adanya modal awal sampai kurangnya minat dari anggota.

## Peran Pengelola Pengembangan Kawasan Agropolitan Soburbang

### 1. BAPPEDA

BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) memiliki peranan penting dalam pengembangan kawasan agropolitan. Karena BAPPEDA merupakan pihak yang merencanakan program agropolitan dan hanya sebagai sekretariat. Sedangkan pelaksana teknisnya adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pembangunan Umum, Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Disperindag. Selain itu, BAPPEDA bertugas merancang master plan dari program agropolitan, merencanakan anggaran serta membentuk tim Kelompok Kerja (POKJA). Serta BAPPEDA berperan dalam penentuan lokasi yang akan menjadi tempat pengembangan kawasan agropolitan.

### 2. BKP3

BKP3 berperan dalam peningkatan kualitas SDM dari petani dan pemilik usaha yang menjadi binaan BKP3. Peningkatan Kualitas SDM dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada petani mulai dari sisi hulu, on farm hingga hilir serta memberikan pelatihan kepada pelaku usaha

tentang pengolahan pasca panen atau diversifikasi pangan agar memiliki nilai tambah. Selain itu berperan dalam pengolahan pasca panen.

3. Dinas Koperasi dan UMKM

Memiliki peran sebagai berikut :

- a. Memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan
- b. Memberikan arahan untuk melakukan usaha secara berkelompok
- c. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan, keterampilan dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan usaha
- d. Memberikan bantuan untuk permodalan dan pemasaran produk.  
Bantuan permodalan bukan menjadi fokus utama dari peran Dinas Koperasi dan UMKM karena yang berperan penting dalam memberikan bantuan modal adalah pihak perbankan.

4. Disperindag

Memiliki peran sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dalam hal perijinan dan label produk ke BPOM
- b. Membantu membuat kemasan dan merek produk untuk menambah daya tarik konsumen

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala terbesar dari pengembangan kawasan agropolitan adalah belum adanya sinergi dari semua stakeholder terkait, terutama antar instansi sebagai pengelola kawasan agropolitan. Disamping itu konsep agropolitan yang bersifat top down membuat kurangnya minat dan dukungan masyarakat lokal.

Stakeholder yang terkait dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan

1. BAPPEDA
2. BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian)
3. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
4. Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
5. Dinas Pertanian dan Peternakan
6. Kelompok Tani
7. Pengusaha Agroindustri

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, terutama pada LPPM Universitas Trunojoyo, dan DIPA Universitas Trunojoyo yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta Ivanovich, 2007. Penguatan Kelembagaan untuk Pengembangan Kawasan agropolitan. Makalah Pelatihan Nasional P4WP dan LPPM-IPB dan Yayasan Tunas Bangsa Bogor
- Argo, Teti. A. 2005, Menguak Keberpihakan Pada Perdesaan Di Indonesia : Membangun Hubungan Desa Kota Bagi Pembangunan Perdesaan, Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan, Vol. I No. 1, Juni 2005
- Badri, Sutrisno. 2004. Keunggulan Kompetitif pada Sistem Agroindustri Kelapa Sawit dengan Penerapan Model klaster Industri. FE-Univ. Widya Dharma Klaten.
- Bakjawaliya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung : Setia Purna Inves
- Bappeda. 2012. Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Kabupaten Bangkalan.
- BPSDM Pertanian, 2003, Pedoman Operasional Pengembangan Kawasan Agropolitan, Departemen Pertanian RI.
- Bryson, JM. 2003. What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. A paper presented at the London School of Economics and Political Science. London.

- Departemen Penataan Ruang. 2009. Areal Potensial di Bangkalan. Pemda Bangkalan
- Galdeano, Rodriguez and Lorente, 2004, Rural Multifunctionality in Europe : The Concept and Policies (90th EAAE Seminar “Multifunctional Agriculture, Policies and Market : Understanding The Critical Linkage”-October 27-29,2004 – Rennes).
- Kosim, Muhammad.2007. Kyai dan Blater (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura). Jurnal KARSA vol.XII No 2 Oktober 2007
- Mercado, G. Ruben, 2002, Regional Development in The Philippines : A Review of Experience, State of The Art and Agenda for Research and Action, Philippine Institute for Development Studies (PIDS), download dari <http://www3.pids.gov.ph/ris/pdf/pidsdps0203.PDF>
- Minfebri. 2007. Peningkatan implementasi Agropolitan untuk Percepatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan X Koto Tanah Datar. Bappeda Tanah Datar Padang.
- Moehar, Daniel, dkk. 2008. PRA (Participatory Rural Appraisal) : Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Robert Robertus, dkk. 2011. Proses Sosial Medium Pembelajaran: Konseptualisasi Habitus Untuk Sosiologi-Pedagog. Jurnal Sosialita Vol. 9 No. 1 Juni 2011, Fakultas Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Jakarta
- Syawie Mochamad. 2006. Dinamika Jaringan Pranata Sosial dalam Ketahanan Sosial pada Kelompok Pedagang Berskala Kecil : Studi Kasus di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. (dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial – Vol. II – No. 03 – Hal. 18 - 25)
- Suryawati, Juju, dkk. 2006. Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII. Jakarta : Esis
- Sutarto, dkk.,2010. Kajian kelembagaan agribisnis Wortel Untuk Mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan SUTHOMADANSIH di kabupaten Karanganyar.Jurnal Carata Tani Vol. XXV no 1 maret 2010
- Tan, Firwan, 2007, Pembangunan Sistem Usaha Ekonomi Inovatif di Daerah, Masalah dan Kebijakan, FE-Unand Mei 2007

